

ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH DAN DI SUMATERA UTARA

Suryani

Alumni Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Hasan Basri

Faisal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

faisal_nurmala@yahoo.com

ABSTRAK

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Pada kenyataannya, tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh dan di Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011-2013 dengan mempergunakan *Mann-Whitney U Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kabupaten/kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah / PDRB, dan rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah; dan (2) kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Aceh atas rasio belanja modal / total belanja daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Aceh harus lebih fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan prinsip efisiensi dan prioritas anggaran.

Kata kunci: analisis rasio, kondisi keuangan daerah

ABSTRACT

The indicators of a successful regional autonomy are an increase in public services and social welfare, more advanced democratic life, justice, equity and the existence of harmonious relations between Center and Regions as well as among Regions. In facts, only few areas that is able to manage various type of local revenue potential maximally, so as to significantly and gradually realize the independence of local finance. This study was conducted to examine and analyze the financial condition of local government in Aceh and North Sumatra for fiscal year 2011-2013 by using Mann-Whitney U Test. The results showed that (1) districts/cities in Aceh have a better level of local financial condition than districts/cities in North Sumatra based on total regional income/total population ratio, regional taxes and levies/GDRPratio, and previous year of unused funds (SiLPA)/regional expenditures ratio; and (2) districts/cities in North Sumatra have a better level of local financial condition than districts/cities in Aceh based on capital expenditure/total regional expenditures ratio. This study implied that local government in Aceh should focus more on the efforts to improve the genuine regional income (PAD) and prioritize the principle of efficiency as well as budget priorities.

Keywords: ratio analysis, financial condition of local government.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang memberi kewenangan yang lebih luas bagi daerah dalam proses pembangunan memberikan implikasi semakin pentingnya peran analisis spasial dalam kebijakan moneter (Atmoko, 2014). Seperti yang kita ketahui, bahwa tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Begitu juga

dengan kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Menurut Kartiwa (2004:1), "Indikasi keberhasilan Otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah."

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena

umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur APBD. Idealnya, PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat *fluktuatif* dan cenderung diluar kontrol atau kewenangan daerah. Berdasarkan kinerja PAD dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang dilakukan oleh Dariwardani dan Amani (2013), diketahui bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi dengan kinerja tinggi. Sedangkan Aceh provinsi dengan kinerja rendah.

Menurut data APBD 2013 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata pertumbuhan total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (19,4%). Menempati urutan ke tiga tertinggi dari seluruh *agregat* pendapatan seluruh daerah per provinsi. Sementara Provinsi Aceh berada pada posisi ke tiga puluh, dengan rata-rata pertumbuhan total pendapatan di bawah (12,5%). Rata-rata pertumbuhan PAD yang terendah yaitu di Provinsi Aceh sebesar 10,9%. Sedangkan Sumatera Utara berada diposisi ke lima tertinggi di atas (27,5%). Di sisi lain rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dari tahun 2009 hingga 2013 cenderung tidak terlalu tajam *fluktuasinya* antar provinsi yaitu di kisaran 9,0% hingga 16,0%, yaitu Provinsi Aceh di bawah 10% dan Provinsi Sumatera Utara di atas 12,5%. Disamping itu, Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menerima transfer Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam jumlah yang cukup besar dari Pemerintah Pusat untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Sedangkan Pemerintah Sumatera Utara tidak menerima Dana Otonomi Khusus (World Bank, 2007).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011-2013, dan menguji apakah kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh berbeda dengan kondisi keuangan daerah kabupaten/ kota di Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011-2013, ditinjau dari rasio pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio PAD/ total pendapatan, rasio ruang fiskal / total pendapatan daerah, rasio pajak daerah dan

retribusi daerah / PDRB, rasio total pendapatan daerah / total belanja daerah, rasio belanja modal / total belanja daerah, rasio belanja pegawai / total belanja daerah, rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah, dan rasio pembayaran pokok hutang dan bunga / total pendapatan daerah.

Artikel ini dimulai dengan kajian pustaka yang berhubungan dengan isu-isu kondisi keuangan daerah, selanjutnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis data, kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada dasarnya, kondisi keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanannya secara berkelanjutan. Yaitu kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan yang ada; (2) bertahan dari terganggunya perekonomian lokal dan regional; dan (3) memenuhi tuntutan pertumbuhan alami, penurunan, dan perubahan. Menurut XiaoHu (2006), kondisi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Selama proses penyediaan barang dan jasa, suatu organisasi dikenai kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang. Semua kewajiban tersebut harus dibayar cepat atau lambat. Jika organisasi dapat membayar kewajiban tersebut tanpa menimbulkan banyak kesulitan keuangan, maka kita mengatakan bahwa kemampuan organisasi untuk membayar tinggi dan organisasi dalam kondisi keuangan yang baik.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah

daerah lainnya (Widodo dalam Halim dan Kusufi, 2013).

Untuk menganalisis kondisi fiskal pemerintahan daerah Honadle, et.al (2004), dan Beckett dan Camarata (2005), mempergunakan *10 point test* yang dikembangkan oleh Brown (1993), karena metode penilaian yang dipergunakan tidak terlalu rumit, namun penilaiannya cukup *komprehensif* yaitu: dapat digunakan untuk membandingkan posisi keuangan kabupaten/kota diseluruh negara. Sepuluh rasio tersebut mengukur unsur-unsur dari kondisi keuangan seperti: (1) kecukupan pendapatan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun; (2) alokasi belanja untuk layanan pemerintah kepada masyarakat; (3) *likuiditas* posisi operasi dalam hal bagaimana keseimbangan positif antara pendapatan dan belanja yang ada dan bagaimana tingkat kecukupan aktiva lancar dan dana cadangan yang dimiliki pemerintah; dan (4) struktur utang pemerintah daerah, baik dalam tingkat jangka pendek maupun jangka panjang serta bagaimana beban pembayaran hutang pokok dan bunga tahunan.

Beckett dan Camarata (2005), telah melakukan penelitian terhadap empat kota di Ohio yaitu Canton, Mansfield, Springfield, dan Loraine dengan mempergunakan *10-point test* yang diperkenalkan oleh Brown dengan kesimpulan bahwa analisis kondisi keuangan sangat bergantung pada analisis laporan dasar keuangan, termasuk catatan yang menyertainya. Catatan atas Laporan Keuangan sangat berguna untuk menentukan struktur *entitas*, metode akuntansi yang digunakan, asumsi yang dibuat, dan informasi latar belakang lainnya yang memberikan pembaca perspektif sebagai laporan keuangan ditinjau. Selain itu, analisis kondisi keuangan harus memperhitungkan pertimbangan faktor *eksternal* tambahan seperti utang per kapita, tingkat pajak, dan pendapatan warga dan kekayaan. Analisis kondisi keuangan yang kompleks karena bisnis pemerintah yang kompleks. Dalam setiap analisis kondisi keuangan, harus dilakukan perbandingan

dengan kelompok yang relevan, dan kekuatan dan kelemahan harus dianggap sebagai kese-luruhan dalam membuat penilaian beralasan tentang kondisi keuangan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012), mengemukakan bahwa terdapat sembilan indikator keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kondisi keuangan daerah di Indonesia, yaitu: (1) indikator pendapatan daerah per kapita; (2) indikator kemandirian keuangan daerah; (3) indikator rasio ruang fiskal daerah; (4) indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah; (5) indikator kemampuan mendanai belanja daerah; (6) indikator belanja modal; (7) indikator belanja pegawai; (8) indikator optimalisasi SiLPA; dan (9) indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan *varian* analisis data sekunder (*existing statistic*), karena data yang dikumpulkan berupa angka yang sudah tersedia di lembaga pemerintahan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Keuangan Aceh, dan Badan Pusat Statistik) atau lainnya, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah (Martono, 2011). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat dalam lingkungan pemerintah Aceh dan Sumatera Utara. Ada 23 (dua puluh tiga) kabupaten/ kota yang terdapat di provinsi Aceh dan 33 (tiga puluh kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan cara *judgment sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel untuk memenuhi suatu kriteria tertentu (Cooper dan Schindler, 2006:139).

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menjadi Sampel Penelitian

| No | Keterangan | Kabupaten/Kota | | Total |
|----|---|----------------|-----------|-----------|
| | | Aceh | Sumut | |
| 1. | Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara | 23 | 33 | 56 |
| 2. | Tersedia data Laporan Realisasi Anggaran | 23 | 30 | 53 |
| | Jumlah Sampel | 23 | 30 | 53 |

Sumber: data sekunder diolah (2015)

Pengujian statistik mempergunakan Uji *Mann-Whitney U* yaitu uji beda untuk dua sampel independen/ bebas yang berukuran tidak sama dan tidak terpenuhinya asumsi distribusi normal terhadap data berskala interval atau rasio, serta sampel yang diambil dari suatu populasi lebih besar dari 20 ($n > 20$) (Siregar, 2013). Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan satu sama lain, yaitu antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi.

Penelitian ini mempergunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau (0,05) dan mempergunakan uji Z, karena jumlah sampelnya yang besar ($n > 20$). Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$U_a = n_a \cdot n_s + \frac{n_a(n_a+1)}{2} - R_a$$

$$U_s = n_a \cdot n_s + \frac{n_s(n_s+1)}{2} - R_s$$

Untuk mencari nilai Z_{hitung} dipilih nilai U_{hitung} yang terkecil di antara U_a dan U_s

$$Z = \frac{U - \frac{n_a \cdot n_s}{2}}{\sqrt{\frac{n_a \cdot n_s (n_a + n_s + 1)}{12}}}$$

dimana:

Z = nilai Z_{hitung}

U_a = jumlah peringkat sampel kab/ kota di Aceh

U_s = jumlah peringkat sampel kab/ kota di Sumut

n_a = sampel kab/ kota di Aceh

n_s = sampel kab/ kota di Sumut

R_a = jumlah rangking pada sampel kab/ kota di Aceh

R_s

= jumlah rangking pada sampel kab/ kota di Sumut

Adapun kriteria pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Jika $-Z_{tabel} \leq Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Atau

Jika *Exact Sig.* $> \alpha$, maka H_0 diterima

Jika *Exact Sig.* $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis terhadap sembilan indikator rasio keuangan daerah pada kabupaten/ kota di Aceh dan di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Peringkat *Mann-Whitney U Test*

| | | Ranks | | |
|---------|----------|-------|-----------|--------------|
| | kab_kota | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| Rasio_1 | Aceh | 23 | 34,65 | 797,00 |
| | Sumut | 30 | 21,13 | 634,00 |
| | Total | 53 | | |

| | | | | |
|---------|-------|----|-------|---------|
| Rasio_2 | Aceh | 23 | 26,00 | 598,00 |
| | Sumut | 30 | 27,77 | 833,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_3 | Aceh | 23 | 25,09 | 577,00 |
| | Sumut | 30 | 28,47 | 854,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_4 | Aceh | 23 | 32,35 | 744,00 |
| | Sumut | 30 | 22,90 | 687,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_5 | Aceh | 23 | 22,35 | 514,00 |
| | Sumut | 30 | 30,57 | 917,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_6 | Aceh | 23 | 18,26 | 420,00 |
| | Sumut | 30 | 33,70 | 1011,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_7 | Aceh | 23 | 30,35 | 698,00 |
| | Sumut | 30 | 24,43 | 733,00 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_8 | Aceh | 23 | 18,89 | 434,50 |
| | Sumut | 30 | 33,22 | 996,50 |
| | Total | 53 | | |
| Rasio_9 | Aceh | 23 | 27,22 | 626,00 |
| | Sumut | 30 | 26,83 | 805,00 |
| | Total | 53 | | |

Sumber: data sekunder diolah (2015)

Tabel 3. Hasil Uji *Mann-Whitney U*

| | Rasio_1 | Rasio_2 | Rasio_3 | Rasio_4 | Rasio_5 | Rasio_6 | Rasio_7 | Rasio_8 | Rasio_9 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mann-Whitney U | 169,000 | 322,000 | 301,000 | 222,000 | 238,000 | 144,000 | 268,000 | 158,500 | 340,000 |
| Wilcoxon W | 634,000 | 598,000 | 577,000 | 687,000 | 514,000 | 420,000 | 733,000 | 434,500 | 805,000 |
| Z | -3,159 | -,413 | -,790 | -2,208 | -1,920 | -3,607 | -1,382 | -3,347 | -,090 |
| Asymp. Sig.(2-tailed) | ,002 | ,680 | ,430 | ,027 | ,055 | ,000 | ,167 | ,001 | ,928 |

a. Grouping Variable: kab_kota

Sumber: data sekunder diolah (2015)

Hasil perbandingan rata-rata rasio kondisi keuangan daerah selama tahun 2011 sampai

dengan tahun 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Rasio Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatera Utara Tahun 2011- 2013

| Rasio | Formula | Rata-rata Rasio Kabupaten/Kota | | Ket. | Hasil Uji Hipotesis |
|-------|---|--------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Aceh | Sumut | | |
| 1 | Total Pendapatan Daerah /Jumlah Penduduk | 3.852.972,95 | 2.652.178,00 | Lebih Baik | Ada perbedaan |
| 2 | PAD /Total Pendapatan Daerah | 4,75 | 6,06 | Tidak Lebih Baik | Tidak ada perbedaan |
| 3 | Rasio Ruang Fiskal /Total Pendapatan Daerah | 27,67 | 30,68 | Tidak Lebih Baik | Tidak ada perbedaan |
| 4 | Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB | 0,61 | 0,45 | Lebih Baik | Ada Perbedaan |
| 5 | Total Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan / Total Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan | 105,40 | 108,97 | Tidak Lebih Baik | Tidak ada Perbedaan |
| 6 | Belanja Modal / Total Belanja Daerah | 17,93 | 25,01 | Tidak Lebih Baik | Ada Perbedaan |
| 7 | Belanja Pegawai / Total Belanja Daerah | 57,91 | 54,13 | Tidak Lebih Baik | Tidak ada perbedaan |
| 8 | SiLPA Tahun Sebelumnya / Total Belanja Daerah | 3,36 | 7,55 | Lebih Baik | Ada Perbedaan |
| 9 | Pembayaran Pokok Utang + Bunga / Total Pendapatan Daerah | 1,09 | 0,56 | Tidak Lebih Baik | Tidak ada perbedaan |

Sumber: data sekunder diolah (2015)

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis terhadap kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh dan di Sumatera Utara secara rinci akan dibahas berdasarkan masing-masing rasio sebagai berikut:

1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk. Ada perbedaan tingkat kemampuan daerah dalam melayani per satu orang penduduknya selama tahun anggaran 2011-2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan

- kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio pendapatan daerah / jumlah penduduk kabupaten/kota di Aceh sebesar Rp3.852.972,95, sedangkan rata-rata rasio pendapatan daerah / jumlah penduduk kabupaten/ kota di Sumatera Utara sebesar Rp2.652.178,00.
2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah. Tidak ada perbedaan tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya selama tahun anggaran 2011–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio kemandirian daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 4,75 persen dan di Sumatera Utara sebesar 6,06 persen.
 3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah. Tidak ada perbedaan tingkat kemampuan daerah dalam mendanai program prioritas daerah tersebut selama tahun anggaran 2011–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio ruang fiskal daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 27,67 persen dan di Sumatera Utara sebesar 30,68 persen.
 4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB. Ada perbedaan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerahnya menjadi penerimaan pajak dan retribusi daerah selama tahun anggaran 2011–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio ruang fiskal daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 0,61 persen dan di Sumatera Utara sebesar 0,45 persen.
 5. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah. Tidak ada perbedaan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah tersebut selama tahun anggaran 2011-2013 antara kabupaten/ kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio total pendapatan daerah / total belanja daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 105,40 persen dan di Sumatera Utara sebesar 108,97 persen.
 6. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah. Ada perbedaan dalam mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya selama tahun anggaran 2012–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio ruang fiskal daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 17,93 persen dan di Sumatera Utara sebesar 25,01 persen.
 7. Rasio Belanja Pegawai / Total Belanja Daerah. Tidak ada perbedaan dalam mengalokasikan belanja pegawai terhadap total belanjanya selama tahun anggaran 2012–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio total pendapatan daerah / total belanja daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 57,91 persen dan di Sumatera Utara sebesar 54,13 persen.
 8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah. Ada perbedaan dalam hal proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun berjalan selama tahun anggaran 2011-2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 3,36 persen dan di Sumatera Utara sebesar 7,55 persen.
 9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah. Tidak ada perbedaan dalam hal proporsi pembayaran pokok hutang dan bunga yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode selama tahun anggaran 2011–2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio pembayaran pokok hutang dan bunga / total pendapatan daerah kabupaten/kota di Aceh

sebesar 1,09 persen dan di Sumatera Utara sebesar 0,56 persen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa kabupaten/ kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah / PDRB, dan rasio SiLPA tahun sebelumnya / belanja daerah, sedangkan kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/ kota di Aceh atas rasio belanja modal / total belanja daerah.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan untuk mencapai kondisi keuangan daerah yang lebih baik, pemerintah daerah di Aceh perlu terus meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimiliki daerah Aceh, dan memperhatikan porsi belanja pegawai dalam APBD agar semakin menurun dibandingkan dengan belanja modal yang diharapkan semakin meningkat, karena semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD, sehingga bisa direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif yang langsung terkait dengan layanan publik. Kemudian, saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah periode penelitian dan memperluas sampel atau populasi penelitian menjadi lebih banyak, sehingga dapat dilakukan pengelompokan daerah kabupaten/kota berdasarkan suatu *cluster* yang membagi daerah kota berdasarkan jumlah penduduk, dan luas wilayah untuk kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, C. (2014). *BI : Kajian Regional untuk Ukur Perekonomian Nasional*. Antara News. Com, Diakses 13 Maret 2015. (<http://www.antarane.ws.com/berita>).
- Beckett, J & Camarata. (2005). Financial Condition. Dalam Rabin, J (Ed.) *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (hlm.104-109). Boca Raton: Taylor & Francis Group, LLC.
- BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan BAPPEDA Aceh. (2014). *Aceh dalam Angka (Aceh in Figures) 2013*. Banda Aceh:Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Brown, K W. (1993). The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Easy-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities. *Government Finance Review: December*: 21-26.
- Cooper, D. & Schindler, P. S. (2006). *Metode Riset Bisnis* (Volume 2 Edisi 9). (Budijanto & Didik Djunaedi, Penerjemah). Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Dariwardani, N.M.I & Amani, S. N. (2013). *Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah*. Diakses 13 Nopember 2015. (www.stialan.ac.id/artikel).
- DiNapoli, T P. (2013). *Local Government Management Guide: Financial Condition Analysis*. New York: Division of Local Government and School Accountability State of New York Comptroller.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah Provinsi Aceh*. Diakses 28 Februari 2015. (www.djpk.depkeu.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara*.Diakses 28 Februari 2015. (www.djpk.depkeu.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011*. Diakses 31 Oktober 2014. (www.djpk.depkeu.go.id).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2013). *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*.Diakses 13 Maret 2015. (www.djpk.depkeu.go.id).

- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multi variate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A& Kusufi, M.S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: salemba empat.
- Honadle, B.W., Costa, J M. & Cigler, B. A. (2004). *Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies*. New York: Elsevier Academic Press.
- Kartiwa, H.A. (2004). *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pendalaman Kompetensi bidang tugas legislatif anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 8 Desember.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2007). *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh: Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh*.
- XiaoHu Wang. (2006). *Financial Management in the Public Sector: Tools, Applications, and Cases*. New York: M.E. Sharpe, Inc.